

BAB IV

PERAN NGO di CHINA

Saat NGO mulai diijinkan oleh pemerintah untuk beroperasi di China, NGO-NGO tersebut mulai gencar dalam mempromosikan nilai dan norma-norma mereka. Dengan meluasnya dan berkembangnya NGO tidak terlepas dari peran mereka yang ikut andil dalam pembangunan. Berikut ini adalah penjabaran tentang peran NGO di China :

A. Implementer Role

Sebagai Implementer Role NGO berperan sebagai organisasi yang memobilisasi dalam menyediakan sumber daya dan pelayanan yang baik bagi target mereka. Mobilisasi tersebut mereka lakukan berdasarkan kegiatan mereka, pemerintah maupun agen pendonor yang memberikan bantuan kepada NGO tersebut. Banyak kegiatan NGO yang dinilai bagus dalam menjalankan program mereka dan menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat seperti peduli kesehatan, keuangan, penyuluhan pertanian, nasehat hukum bagi masyarakat hingga pemberian bantuan secara darurat. Tidak jarang NGO melakukan perjanjian dengan pemerintah maupun pendonor dana dalam penanganan masalah yang nantinya dapat terjadi hubungan timbal balik (Lewis, hal. 68).

Pada peran ini NGO selalu memberikan pelayanan baik bagi masyarakat. Secara keseluruhan, NGO sebagai implementer role selalu memberikan pelayanan yang diinginkan dan dibutuhkan bahkan yang tidak tersedia oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh NGO tidak selalu pada sasarannya seperti masyarakat maupun pemerintah tetapi NGO juga melakukan penelitian dengan berbagai sektor swasta. Pada dasarnya peran ini berfungsi untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada akhir tahun 1980an struktur NGO mulai dibawa dalam structural Bank Dunia.

Tidak sedikit yang menyangsikan peran NGO ini. NGO dianggap telah melenceng dalam melaksanakan kegiatannya yang tidak sesuai dengan tujuannya karena NGO mulai berdekatan dengan sektor-sektor bisnis swasta. Namun anggapan itu tidak sepenuhnya benar karena NGO terbilang sukses dalam penyampaian pelayanan publik contohnya saja pada bidang pertanian yang mana mereka memberikan pelayanan kepada orang-orang yang daerahnya susah untuk dijangkau karena lahan yang mereka memiliki tingkat resiko dan kerentanan yang tinggi. Dalam kasus pertanian NGO bekerja sama dengan para pemilik lahan maupun penduduk setempat dengan memberikan inovasi, pelatihan dan penelitian. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak lain adalah untuk menyampaikan dan menyebarkan nilai-nilai NGO.

NGO berkembang secara sederhana namun dengan kemampuan teknologi yang ada saat ini membuat mereka tumbuh dan berkembang secara cepat. Meningkatnya aktivitas NGO dalam pemberian pelayanan dinilai mampu menciptakan dan mengembangkan masyarakat sipil global yang nantinya dapat meningkatkan nilai demokrasi dan akuntabilitas suatu negara tidak terkecuali di China. Sesuai dengan implementer role, tidak jarang NGO China membantu pemerintah dalam memberikan berbagai bidang ketika pemerintah pusat tidak mampu menanganinya sendiri.

Salah satu implementer role yang dilakukan oleh NGO di China adalah pemberian bantuan darurat bencana alam. Seperti yang terjadi pada 12 Mei 2008 saat China khususnya di daerah Sichuan diguncang gempa. Pada 23 April 2013 para petinggi NGO dan pemimpin grassroot NGO berkumpul untuk menanggapi tanggap darurat bencana yang menewaskan lebih dari 80.000 orang. Diskusi tersebut berkaitan dengan pemberian bantuan dan pemulihan setelah bencana. Pemerintah China memerintahkan NGO untuk mendistribusikan bantuan pada korban bencana Sichuan. Setidaknya ada 18 NGO yang ikut mendistribusikan bantuan di wilayah tersebut dan membantu pemerintah untuk pemulihan wilayah bencana (Asia, 2013).

NGO China tidak hanya memberikan bantuan dan pelayanan bagi masyarakat local namun juga bagi masyarakat internasional yang membutuhkan dengan nilai kemanusiaan. NGO China bekerja sama dengan PBB dan organisasi lain yang bergerak dibidang kemanusiaan memberikan bantuan kepada korban bencana Badai Matthew di Haiti menyebabkan 1,4 juta penduduk Haiti termasuk anak-anak didalamnya menjadi korban. NGO-NGO tersebut memberikan bantuan berupa makanan, air bersih dan obat-obatan yang dibutuhkan. Tanggap bencana dan pemberian bantuan NGO China bagi penduduk Haiti dinilai sangat baik untuk memperluas jangkauan NGO hingga melampaui batas-batas Negara khususnya China (Bo, 2016).

Salah satu contoh NGO yang beroperasi di China yang sesuai dengan implementer role yaitu ICRC China atau International Commite of Red Cross. Organisasi yang berdiri sejak 1863 memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak perang dan konflik serta mempromosikan hokum yang digunakan untuk melindungi korban perang. Kegiatan ICRC tidak hanya memberikan bantuan terhadap korban perang saja tetapi juga yang berkaitan dengan kesehatan, pemerhati lingkungan bahkan pada keamaan. Sasaran NGO ini pun beragam mulai dari perempuan, anak-anak hingga pengungsi yang terkena dampak bencana maupun konflik ((ICRC, 2011).

ICRC di China mulai muncul dan berkembang pada tahun 2005. ICRC China mempromosikan hokum humanitarian dan prinsip kemanusiaan yang bekerja sama dengan pemerintah, angkatan bersenjata dan para ahli di China. ICRC bekerja sama dengan organisasi local seperti Palang Merah untuk memperkuat kapasitas masyarakat terkait hokum humanitarian dan prinsip kemanusiaan di seluruh dunia.

NGO lain yang memiliki prinsip sama dengan ICRC dan sesuai dengan peran NGO sebagai implementer role yaitu Himalayan Foundation. Himalayan Foundation memberikan akses bantuan

kepada penduduk yang tinggal dipegunungan Himalaya. Salah satu sasaran yang menerima bantuan dari Himalayan Foundation adalah penduduk dataran tinggi Tibet di China. Penduduk dataran tinggi Tibet tidak mendapatkan akses kehidupan seperti penduduk China lainnya selain akses mereka sulit untuk dijangkau, kebanyakan penduduk Tibet tidak mendapatkan pengakuan dari negaranya. Dengan adanya Himalayan Foundation, penduduk Tibet dapat membangun jembatan, mengakses air bersih, sekolah hingga klinik yang menguntungkan mereka (Foundation H. , t.thn.).

NGO ini selain memberi bantuan berupa akses kehidupan bagi penduduk Tibet, Himalayan Foundation juga memberikan dukungan bagi para tokoh agama Budha yang berada di pegunungan Tibet untuk dapat bertahan hidup. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa materi tetapi juga non materi seperti mendukung agar tetap melestarikan budaya dan tradisi keagamaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka (Ibid).

B. *Catalyst Role*

Sebagai Catalyst Role NGO memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memberikan fasilitas atau berkontribusi dalam perubahan pembangunan antara actor-aktor didalam organisasi maupun tingkat individu. Kegiatan tersebut termasuk mengkoordinir organisasi akar rumput dan pembentukan kelompok sebagai landasan social, pendekatan untuk pemberdayaan pembangunan, melakukan lobby dan advokasi, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, serta mempromosikan dan mengkampanyekan NGO secara umum ((Lewis).

Peran NGO sebagai katalisator dapat dikatakan sebagai peran penghubung. Peran yang mampu menimbulkan perubahan. Beberapa ilmuwan barat menyebutkan bahwa NGO adalah sektor ketiga sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam peran ini NGO sebagai actor yang mampu mengadvokasi

pemerintah yang dinilai masyarakat tidak sesuai dalam penggunaan kekuasaannya. Advokasi yang dilakukan NGO dianggap mampu untuk mempengaruhi tindakan negara secara langsung.

Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh para NGO untuk memberdayakan mereka yang lemah dan membantu mendapatkan akses informasi sehingga mereka mampu menjangkau dunia luar bahkan tidak jarang masyarakat mulai tahu apa yang pemerintah pusat lakukan dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan. Tujuan lain dari advokasi yang dilakukan NGO adalah untuk mendemokratisasikan sebuah sistem. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh NGO dengan pemerintah dan masyarakat umum tetapi juga sesama NGO. Peran NGO sebagai advokasi juga menjalin dengan NGO lain baik local maupun internasional untuk memperluas jaringan mereka yang nantinya dapat mendesak pemerintah pusat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan (Jordan & Tuijl).

Advokasi yang dilakukan NGO lokal dengan NGO luar negeri sering disebut dengan jaringan advokasi transnasional yang memiliki tujuan untuk memperluas dan mengembangkan jaringan yang dimiliki oleh NGO. Advokasi yang dilakukan berupa kampanye global untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka salah satunya adalah kepentingan politik. Memperluas jaringan dan advokasi adalah kunci utama dari penyebarluasan norma dan nilai dari NGO (Zhang & Ghuo).

Menurut beberapa ahli advokasi yang dilakukan oleh NGO sangat berkontribusi dalam menilai respon pemerintah terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Menurut McCarthy dan Castelli dalam artikel yang berjudul *Advocacy by Chinese Nonprofit Organization* advokasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu advokasi secara langsung dan advokasi tidak langsung. Advokasi langsung berupa pembentukan opini public dan kebijakan sedangkan advokasi tidak langsung berupa pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat akar rumput dan memobilisasi massa (Ibid).

Catalyst role yang diartikan sebagai kegiatan advokasi oleh NGO juga dilakukan oleh NGO di China. Dengan percepatan pertumbuhan NGO membuat mereka lebih gencar dalam memperluas nilai dan norma yang miliki. NGO China yang bergerak dibidang advokasi salah satunya adalah Human Right In China atau HRIC. Tujuan dari advokasi yang dilakukan HRIC adalah memberikan dukungan kepada masyarakat sipil di China dan memberikan wawasan kepada masyarakat atas kewaspadaan dan perhatian terhadap isu-isu yang sedang terjadi disekitar mereka (China H. R., t.thn.).

Advokasi yang dilakukan untuk membantu individu maupun kelompok yang memiliki kasus yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan memberikan solusi kepada mereka untuk jangka waktu yang panjang. Macam kegiatan advokasi mereka berupa penelitian, pelatihan hingga studi kasus terkait hak asasi manusia. Setelah advokasi yang dilakukan berhasil HRIC mulai mempromosikan hasil advokasi mereka kepada pemerintah, NGO local maupun internasional dan kelompok-kelompok lainnya yang memegang kendali kekuasaan. Focus area mereka meliputi kebebasan berpendapat, social, ekonomi, kebudayaan hingga kemudahan akses untuk informasi.

Advokasi yang dilakukan oleh NGO tidak terbatas pada bidang-bidang umum saja tetapi juga pada bidang pemberdayaan seperti pemberdayaan perempuan. Sejak China merdeka pada tahun 1949 dan dianggap sebagai Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, mulai ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan bahkan tidak jarang perempuan di China mengalami diskriminasi. Tidak berhenti pada diskriminasi saja tetapi perempuan di China juga dilarang untuk berpartisipasi dalam politik, mendapatkan akses yang kehidupan yang baik berupa pendidikan, kesejahteraan hingga kesehatan (Jones, 2012).

Berdasarkan adanya diskriminasi gender tersebut muncullah ACWF atau All China Womens Federation yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang gender kepada

pemerintah dan masyarakat karena hal tersebut adalah salah satu tindakan dari advokasi yang dilakukan oleh NGO. Tujuannya tidak lain agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan gender sehingga perempuan-perempuan di China dapat berkontribusi dalam pembangunan. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi NGO yang bergerak dibidang gender maupun pemberdayaan perempuan akan lebih mudah untuk menyebarluaskan konsep gender (Ibid).

C. Partner Role

Sebagai Partner Role, NGO yang mulai tumbuh dan berkembang mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, pendonor dana dan sektor-sektor yang ikut bekerja sama dengan NGO. Kerja sama NGO tidak hanya dilakukan oleh ketiga sektor tersebut namun juga dilakukan dengan sesama NGO dengan tujuan untuk membangun kapasitas NGO-NGO tersebut. Banyaknya kepentingan dalam hubungan kerja sama pembangunan yang berjalan menjadikan pemerintah membangun jaringan dengan para NGO maupun organisasi lainnya.

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan NGO akan berjalan dengan baik jika terpenuhi beberapa unsur pendukungnya seperti sumber daya, kekuatan, meminimalisir kesenjangan dan persepektif. Hubungan antara pemerintah dengan NGO dapat meningkatkan transparansi diantara keduanya dan meningkatkan peluang demokratisasi. Hubungan kerja sama yang dilakukan kedua actor tersebut terdapat pembagian peran dan tanggung jawab, resiko, serta bersama mencapai tujuan bersama.

Hubungan antara pemerintah dan NGO tidaklah mudah keduanya harus melalui proses negosiasi untuk mewujudkan hubungan timbal balik. Peran NGO partnership role membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan tidak jarang membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena kedua actor harus memiliki jaringan komunikasi yang baru hingga staff yang baru dan baik agar nantinya dapat menjalin komunikasi dengan agen-agen NGO lainnya. Berhasil atau tidaknya kerjasama

antara pemerintah dengan NGO dapat dilihat dari pembangunan yang ada. Tidak berbeda jauh dengan peran pertama yaitu implementer role yang menekankan bahwa keduanya tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan awal (Lewis).

Terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri yang menimbulkan adanya kerjasama antara keduanya seperti pengentasan kemiskinan, permasalahan lingkungan, hingga masalah-masalah akar rumput yang tidak tersentuh oleh tangan pemerintah bahkan yang berkaitan dengan reformasi ekonomi. Pada masa reformasi ekonomi, pemerintah China secara terang-terangan menjaga dan memelihara adanya NGO dengan tujuan dapat menjaga stabilitas masyarakat China saat terjadinya reformasi (Report, 2005).

Sebagai kelompok yang menjalin hubungan dengan pemerintah China pada saat itu, pemerintah China sangat berharap NGO dapat menjadi mitra kerja yang baik dalam membantu memberikan layanan kepada masyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah China dengan NGO selain membantu dalam memberikan pelayanan, tujuan lainnya adalah agar pembangunan NGO China dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Meskipun menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat, NGO China tidak menentang ataupun mengancam keberlangsungan sistem politik negara karena menurut para NGO menjalin kemitraan dan hubungan yang baik dengan pemerintah adalah cara agar NGO dapat bertahan dan mendapat dukungan dari pemerintah (Ibid).

Kebanyakan NGO China memilih untuk tidak beraktivitas pada ranah politik maupun bidang-bidang yang dinilai sensitive bagi pemerintah karena menurut para NGO mereka akan lebih sulit untuk menyebarluaskan jaringan mereka jika mereka bergerak dibidang politik dan sensitive menurut pemerintah setempat. Salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan NGO China adalah pengentasan kemiskinan. Kemajuan ekonomi yang terjadi di China ternyata tidak

serta merta mengurangi angka kemiskinan yang terjadi. Hingga pada akhirnya Pimpinan Lembaga Pengentasan Kemiskinan yang disingkat LGOP (Leading Group of Poverty Allevation and Development) mempercayai NGO China untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan dukungan dan pengakuan dari pemerintah .

Melibatkan NGO dalam upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dinilai efektif, efisien dan tepat sasaran hingga keseluruhan China. NGO dan pemerintah China berfokus pada pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Keterlibatan NGO dalam pengentasan kemiskinan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. NGO dianggap mampu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak (Bank A. D., 1991).

NGO China yang bergerak dalam bidang pengentasan kemiskinan salah satunya yaitu China Foundation for Poverty Allevation (CFPA). NGO yang didirikan pada tahun 1989 memiliki tujuan untuk menjadi NGO yang terpercaya dengan misi mengurangi kemiskinan, menyebarkan kemiskinan dan selalu berbuat kebaikan. Program domestik NGO ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan hidup dalam populasi yang beragam. Beberapa program domestik CFPA yaitu kesehatan, pendidikan, bantuan bencana alam, dan penghidupan ekonomi bagi penduduk pedesaan (Allevation, t.thn.).

Bidang kesehatan CFPA berupaya untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dimasyarakat pedesaan dan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan yang didapatkan. Bahkan CFPA memberikan fasilitas untuk akses kesehatan hingga permasalahan gizi bagi ibu dan anak. Bidang pendidikan, CFPA mendirikan asrama-asrama bagi anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi dan memperbaiki bangunan sekolah yang sudah tidak layak. Bidang penghidupan masyarakat pedesaan, CFPA memberikan bantuan pinjaman maupun kredit bagi masyarakat yang hidup

dengan kemiskinan serta memberikan akses bagi mereka yang bergerang dalam bidang pertanian maupun usaha kecil menengah. Sedangkan untuk bantuan bagi korban bencana alam CFPA berusaha untuk meminimalisir dampak negative dari bencana alam dalam jangka waktu yang panjang (Ibid).

NGO ini tidak hanya memiliki program domestic saja tetapi juga menjalankan program internasionalnya dalam pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2005 CFPA sudah menerapkan program mereka di 12 negara diantaranya Sudan, Pakistan, Myanmar dan tidak terkecuali Indonesia. Program-program yang dilakukan oleh CFPA tidak lain hanyalah untuk mengurangi dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari kemiskinan yang terjadi baik di China maupun dinegara lainnya.

Dari ketiga peran penting NGO diatas dapat dikatakan bahwa NGO memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemunculan NGO secara umum dapat menciptakan negosiasi antar Negara yang berpengaruh pada kepentingan global bahkan tidak jarang peran NGO sangat dibutuhkan dalam penghapusan perbudakan. Dalam pembangunan peran NGO tidak hanya berpusat pada hubungan antar Negara tetapi meluas hingga bidang bisnis. Dengan kemajuan dan kecepatan teknologi saat ini membuat NGO semakin udah untuk memobilisasi masyarakat dan para aktivis untuk memusatkan perhatian mereka terhadap lingkungan sosialnya (Development, t.thn.).

Dalam menjalankan peran-perannya kelompok maupun organisasi seperti NGO memiliki keberagaman dalam langkah dan program apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan mereka yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, setiap NGO tidak ingin jika terjadi hambatan yang dapat menghambat kinerja mereka dalam melayani masyarakat seperti kendala keungan dan bahkan tidak sedikit pula NGO bekerja

sama dengan sektor swasta dalam hal pendanaan. Namun bagi setiap NGO yang terpenting bagi mereka adalah saat NGO-NGO tersebut mendapatkan tempat dimasyarakat dan berguna bagi masyarakat (Ibid).

Ditegaskan kembali bahwa peran NGO dalam pembangunan sangatlah penting terutama bagi Negara yang sangat tertutup dengan adanya kelompok maupun organisasi seperti China. Tidak jarang dari NGO-NGO di Negara yang cenderung tertutup berbenturan dengan hukum, ideology dan tradisi politik disetiap Negara. Sesuai dengan sifatnya yang fleksibel NGO tidak jarang memastikan adanya transparansi antara masyarakat dengan para pemegang kekuasaan dalam menjalankan programnya. Dengan keterbukaan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh NGO, membuat mereka menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat dan dianggap mampu dalam penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah ditingkat nasional (Uwejevwe, 2005).

Keberadaan NGO sudah melekat di kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat China yang menerima kehadiran NGO di Negara mereka. Masyarakat China berkeyakinan bahwa NGO local maupun internasional yang beroperasi melalui perannya mampu mengadvokasi dan mempengaruhi pemerintah China dalam proses pembuatan kebijakan yang dinilai otoriter. Bahkan tidak sedikit masyarakat China yang mendukung keberadaan NGO untuk beroperasi di Negara mereka meskipun awalnya mendapatkan larangan dan hambatan dari pemerintah pusat.